

Dinamika Sosial Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Payo Sigadung Kota Jambi

Adib Al Furqon^{1*}, Dinda Syufradian Putra², Riri Maria Fatriani³, Dimas Subekti⁴

¹ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: wtrynurhikmah@gmail.com*

² Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: dinda8966@unja.ac.id

³ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: ririmariafatriani@unja.ac.id

⁴ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: dimassubekti05@unja.ac.id

History Artikel:

Diterima 1 Juni 2026

Direvisi 15 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Tersedia online 21 Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial masyarakat pasca penutupan Lokalisasi Payo Sigadung Kota Jambi. Penutupan lokalisasi dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Meskipun secara resmi telah ditutup, berbagai laporan menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi masih ditemukan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan lokalisasi membawa perubahan sosial berupa meningkatnya rasa aman masyarakat, berkurangnya aktivitas prostitusi terbuka, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban lingkungan. Namun demikian, masih ditemukan praktik prostitusi terselubung, munculnya stigma sosial terhadap kawasan eks lokalisasi, serta keresahan masyarakat akibat aktivitas yang masih berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi bersifat dinamis dan belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan.

Kata Kunci: Dinamika Sosial, Perubahan Sosial, Lokalisasi, Payo Sigadung, Kota Jambi

Abstract

This study aims to analyze the social dynamics of the community following the closure of the Payo Sigadung Localization in Jambi City. The closure of the localization was carried out through Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning the Eradication of Prostitution and Immoral Acts. Despite its official closure, various reports indicate that prostitution activities are still found in the area. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted using Soerjono Soekanto's theory of social change. The results show that the closure of the localization brought about social changes in the form of an increased sense of security in the community, a reduction in open prostitution activities, and increased public awareness of the importance of environmental order. However, hidden prostitution practices are still found, social stigma arises regarding the former localization area, and community unrest due to ongoing activities. These findings indicate that the social changes that have occurred are dynamic and have not fully achieved the policy objectives.

Keywords: Social Dynamics, Social Change, Localization, Payo Sigadung, Jambi City

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan prostitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan hukum, tetapi juga memiliki implikasi terhadap ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, serta pembangunan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu berbagai daerah menerapkan kebijakan

penutupan lokalisasi sebagai upaya mengurangi praktik prostitusi dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Di Kota Jambi, upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Salah satu sasaran utama kebijakan tersebut adalah Lokalisasi Payo Sigadung yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat aktivitas prostitusi terbesar di Kota Jambi. Penutupan lokalisasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lokalisasi telah ditutup, aktivitas prostitusi masih ditemukan hingga saat ini. Prostitusi tidak lagi berlangsung secara terbuka sebagaimana sebelum penutupan, tetapi berubah menjadi praktik yang lebih terselubung melalui rumah kontrakan, tempat hiburan, dan jaringan informal lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penutupan lokalisasi mampu mengubah kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penutupan lokalisasi tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai dinamika sosial yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menjelaskan perubahan kondisi sosial masyarakat pasca penutupan Lokalisasi Payo Sigadung melalui perspektif disorganisasi sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dinamika sosial masyarakat pasca penutupan Lokalisasi Payo Sigadung di Kota Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setelah diterapkannya kebijakan penutupan lokalisasi.

Lokasi penelitian berada di kawasan eks Lokalisasi Payo Sigadung Kota Jambi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPRD Kota Jambi, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eks lokalisasi.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Meningkatnya ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat

Salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah penutupan lokalisasi adalah berkurangnya aktivitas prostitusi yang dilakukan secara terbuka. Sebelum penutupan, kawasan Payo Sigadung identik dengan aktivitas prostitusi yang mudah ditemukan oleh masyarakat umum. Keberadaan lokalisasi tidak hanya menimbulkan keresahan moral tetapi juga meningkatkan potensi gangguan ketertiban umum seperti keributan, konsumsi minuman keras, serta tindak kriminalitas yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi.

Setelah penutupan dilakukan, masyarakat mulai merasakan perubahan pada kondisi lingkungan. Aktivitas yang sebelumnya terlihat secara terbuka menjadi jauh berkurang. Hal ini menciptakan persepsi bahwa kawasan menjadi lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Dalam perspektif disorganisasi sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan fungsi kontrol sosial formal melalui kebijakan pemerintah dan penegakan hukum oleh Satpol PP.

2. Prostitusi berubah menjadi praktik terselubung

Meskipun penutupan lokalisasi berhasil mengurangi prostitusi terbuka, penelitian menemukan bahwa praktik prostitusi tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, prostitusi mengalami transformasi bentuk dari aktivitas yang terpusat menjadi aktivitas yang tersebar dan sulit diawasi. Beberapa informan menjelaskan bahwa aktivitas prostitusi masih berlangsung melalui kos-kosan, kontrakan, tempat hiburan tertentu, hingga penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penutupan fisik lokalisasi tidak otomatis menghilangkan faktor sosial dan ekonomi yang mendorong prostitusi.

Dalam teori disorganisasi sosial, kondisi tersebut menggambarkan lemahnya kontrol sosial informal yang seharusnya mampu mencegah munculnya kembali perilaku menyimpang setelah intervensi pemerintah dilakukan.

3. Munculnya stigma terhadap Kawasan Eks Lokalisasi

Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat masih memberikan stigma negatif terhadap kawasan Payo Sigadung. Meskipun secara administratif lokalisasi telah ditutup, identitas kawasan sebagai "tempat prostitusi" masih melekat kuat dalam persepsi publik. Akibatnya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sering mengalami stereotip negatif dari masyarakat luar. Stigma ini berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat serta menghambat upaya pembangunan citra positif kawasan.

Secara sosiologis, stigma merupakan bentuk konsekuensi sosial yang sering muncul setelah suatu wilayah dikaitkan dengan aktivitas menyimpang dalam jangka waktu yang panjang.

4. Keresahan masyarakat terhadap aktivitas prostitusi yang masih berlangsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa kebijakan penutupan belum sepenuhnya berhasil karena aktivitas prostitusi masih ditemukan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa razia yang dilakukan sering kali hanya memberikan efek sementara karena aktivitas prostitusi kembali muncul setelah penertiban selesai dilakukan. Keresahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

5. Lemahnya rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

Temuan lain yang cukup penting adalah belum optimalnya program rehabilitasi sosial bagi kelompok yang terdampak. Sebagian mantan pekerja seks tidak memperoleh pendampingan ekonomi yang berkelanjutan sehingga mengalami kesulitan mencari sumber penghasilan alternatif. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kembalinya individu ke praktik prostitusi.

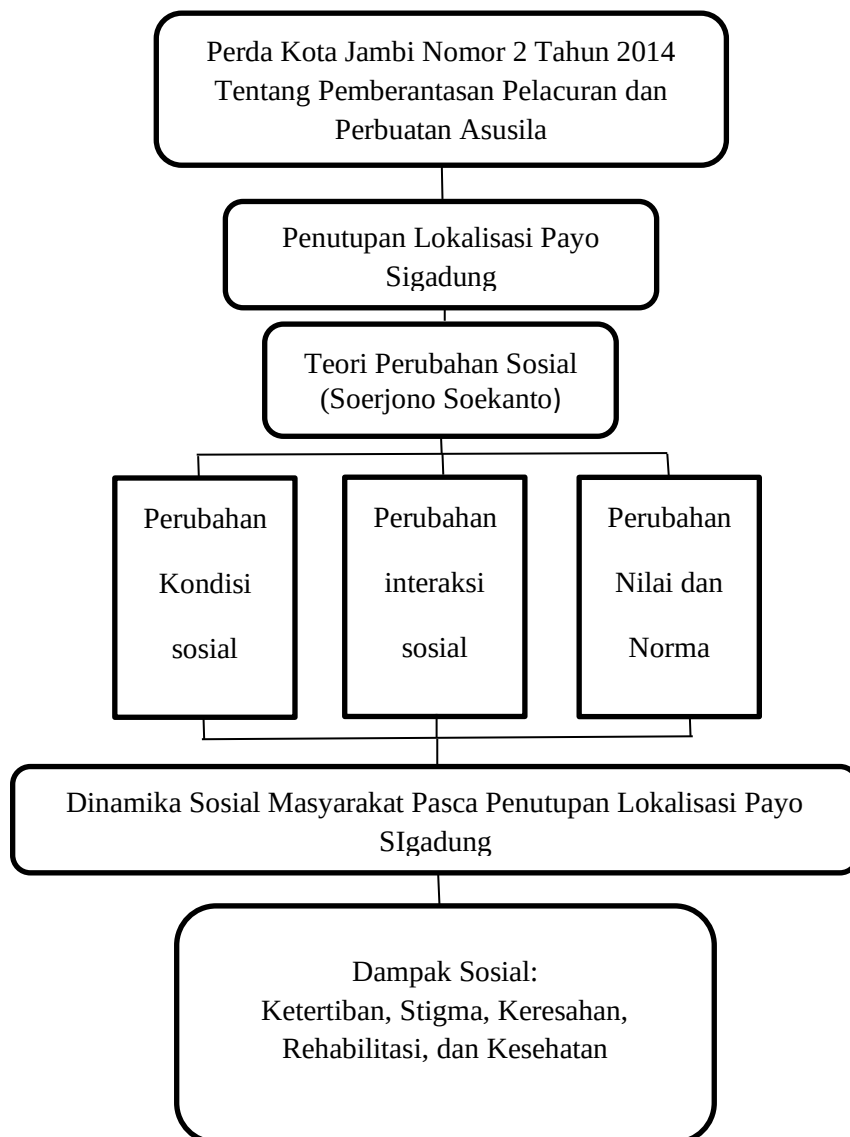
Dalam konteks ini, penutupan lokalisasi lebih berfokus pada aspek penertiban dibandingkan transformasi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Akibatnya akar permasalahan prostitusi seperti kemiskinan, keterbatasan keterampilan, dan minimnya kesempatan kerja belum sepenuhnya teratasi.

6. Dinamika kesehatan masyarakat pasca penutupan

Penutupan lokalisasi juga memiliki implikasi terhadap aspek kesehatan masyarakat.

Ketika prostitusi berpindah ke bentuk terselubung, proses pendataan dan pengawasan kesehatan menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Jika sebelumnya kelompok berisiko dapat dijangkau melalui pendekatan berbasis lokasi, maka setelah penutupan pendekatan tersebut menjadi lebih kompleks karena aktivitas prostitusi tersebar di berbagai tempat.

Bagan 1. Model temuan penelitian Dinamika Sosial Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Payo Sigadung Kota Jambi



PEMBAHASAN

Penutupan Lokalisasi Payo Sigadung melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Sebelum penutupan dilakukan, Payo Sigadung dikenal sebagai kawasan yang identik dengan aktivitas prostitusi yang berlangsung secara terbuka. Keberadaan lokalisasi tidak hanya menimbulkan persoalan moral, tetapi juga memengaruhi ketertiban lingkungan, keamanan masyarakat, dan hubungan sosial antarwarga. Setelah kebijakan penutupan diterapkan, masyarakat mulai merasakan adanya perubahan pada kondisi lingkungan. Aktivitas prostitusi yang sebelumnya terlihat secara langsung menjadi berkurang sehingga menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman. Berkurangnya mobilitas pengunjung yang datang untuk tujuan prostitusi juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi berhasil menciptakan perubahan sosial yang diharapkan pemerintah, khususnya dalam aspek ketertiban umum dan penguatan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Meskipun demikian, perubahan yang terjadi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi tidak benar-benar hilang setelah lokalisasi ditutup, melainkan mengalami perubahan bentuk menjadi lebih terselubung. Aktivitas yang sebelumnya terpusat di kawasan lokalisasi berubah menjadi aktivitas yang tersebar di berbagai tempat seperti rumah kontrakan, kos-kosan, penginapan, maupun melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penutupan fisik lokalisasi belum mampu menghilangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama praktik prostitusi. Perubahan pola prostitusi tersebut sekaligus menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah karena aktivitas yang berlangsung secara tersembunyi lebih sulit untuk diawasi dibandingkan ketika prostitusi masih terpusat pada satu kawasan tertentu. Akibatnya, meskipun secara administratif lokalisasi telah ditutup, masyarakat masih menemukan indikasi keberadaan praktik prostitusi yang menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.

Selain memengaruhi pola aktivitas prostitusi, penutupan lokalisasi juga membawa perubahan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Sebelum penutupan dilakukan, sebagian warga memiliki ketergantungan ekonomi terhadap keberadaan lokalisasi. Banyak masyarakat memperoleh penghasilan dari usaha warung, jasa transportasi, rumah kontrakan, maupun berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di sekitar kawasan prostitusi. Ketika lokalisasi ditutup, sumber pendapatan tersebut mengalami penurunan sehingga memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi yang baru. Pada saat yang sama, masyarakat mulai menunjukkan partisipasi yang lebih besar dalam menjaga ketertiban lingkungan melalui pelaporan aktivitas yang dianggap mencurigakan kepada aparat pemerintah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi pola hubungan sosial antara masyarakat dengan lingkungan maupun dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Dinamika sosial lainnya yang muncul pasca penutupan lokalisasi adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap kawasan eks Lokalisasi Payo Sigadung. Meskipun secara resmi lokalisasi telah ditutup selama bertahun-tahun, masyarakat luar masih sering mengidentikkan kawasan tersebut dengan praktik prostitusi. Stigma ini tidak hanya melekat pada wilayahnya, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Sebagian warga mengaku masih mendapatkan pandangan negatif karena tempat tinggal mereka berada di kawasan yang pernah dikenal sebagai pusat prostitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan perubahan perilaku atau aktivitas masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan perubahan persepsi yang membutuhkan waktu lebih lama. Stigma yang terus melekat dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan sosial karena memengaruhi citra wilayah dan mengurangi kepercayaan masyarakat luar terhadap kawasan tersebut.

Keresahan masyarakat terhadap aktivitas prostitusi yang masih berlangsung juga menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian masyarakat menilai bahwa tujuan utama kebijakan penutupan belum tercapai sepenuhnya karena praktik prostitusi masih ditemukan dalam berbagai bentuk yang lebih tersembunyi. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa penegakan kebijakan belum berjalan secara optimal. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan razia yang bersifat sementara, tetapi juga melakukan pengawasan yang berkelanjutan agar aktivitas prostitusi tidak kembali berkembang. Keresahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, masyarakat masih menilai bahwa efektivitas kebijakan perlu ditingkatkan agar tujuan pemberantasan prostitusi dapat tercapai secara lebih maksimal.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi dinamika sosial pasca penutupan lokalisasi adalah belum optimalnya program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi kelompok yang terdampak. Penutupan lokalisasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penertiban aktivitas prostitusi, tetapi juga menyangkut upaya pemulihan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang dilakukan belum berjalan secara berkelanjutan. Sebagian kelompok rentan masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan sumber penghasilan alternatif setelah lokalisasi ditutup. Keterbatasan pelatihan keterampilan, minimnya pendampingan usaha, dan kurangnya dukungan ekonomi menyebabkan sebagian individu masih berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Situasi ini berpotensi mendorong munculnya kembali praktik prostitusi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, keberhasilan penutupan lokalisasi tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya aktivitas prostitusi secara fisik, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok yang terdampak.

Dari sisi kesehatan masyarakat, penutupan lokalisasi juga menimbulkan tantangan baru. Ketika prostitusi masih terpusat di satu lokasi, pemerintah relatif lebih mudah melakukan pendataan, pengawasan kesehatan, serta program pencegahan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Namun setelah aktivitas prostitusi berubah menjadi lebih tersebar dan terselubung, proses pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Akibatnya, kelompok berisiko menjadi lebih sulit dijangkau oleh program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi pendamping. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi penyebaran penyakit menular seksual karena pengawasan yang sebelumnya terfokus pada satu kawasan kini harus dilakukan terhadap jaringan yang lebih luas dan tersebar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih adaptif agar program pencegahan dan penanggulangan penyakit tetap dapat berjalan secara efektif meskipun pola prostitusi telah mengalami perubahan.

Berdasarkan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto, penutupan Lokalisasi Payo Sigadung dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan mengubah tatanan sosial masyarakat menuju kondisi yang lebih tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menghasilkan dampak positif berupa meningkatnya ketertiban lingkungan, berkurangnya prostitusi terbuka, serta menguatnya kontrol sosial masyarakat. Akan tetapi, perubahan sosial yang terjadi belum sepenuhnya bersifat menyeluruh karena masih ditemukan berbagai bentuk adaptasi sosial seperti prostitusi terselubung, stigma sosial, dan persoalan rehabilitasi ekonomi yang belum terselesaikan. Dengan demikian, dinamika sosial pasca penutupan Lokalisasi Payo Sigadung menunjukkan bahwa perubahan sosial merupakan proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang panjang. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penutupan fisik suatu kawasan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun perubahan sosial yang berkelanjutan melalui pengawasan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan nilai dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Penutupan Lokalisasi Payo Sigadung telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Kebijakan ini berhasil mengurangi praktik prostitusi yang dilakukan secara terbuka, meningkatkan ketertiban lingkungan, serta memperkuat norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, prostitusi belum sepenuhnya hilang dan cenderung berubah menjadi aktivitas yang lebih terselubung sehingga sulit diawasi. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap kawasan eks lokalisasi, keresahan masyarakat terhadap aktivitas prostitusi yang masih berlangsung, serta belum optimalnya program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang terdampak. Berdasarkan teori perubahan sosial Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial pasca penutupan lokalisasi telah terjadi, tetapi belum berlangsung secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan serta dukungan program sosial dan ekonomi agar tujuan penutupan lokalisasi dapat tercapai secara lebih optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kawasan eks Lokalisasi Payo Sigadung melalui kerja sama yang lebih kuat antara Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan masyarakat. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah munculnya kembali praktik prostitusi dalam bentuk terselubung.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang terdampak penutupan lokalisasi. Program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan bantuan ekonomi produktif perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang layak dan tidak kembali bergantung pada aktivitas prostitusi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak ekonomi, efektivitas program rehabilitasi sosial, serta strategi pemberdayaan masyarakat pasca penutupan lokalisasi sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujoko, N. A., Husodo, B. T., & Musthofa, S. B. (2021). Stigma masyarakat terhadap pekerja seksual dalam program pencegahan HIV/AIDS. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(1), 12–21.
- Masrukhin. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Media Ilmu Press.
- Murdiyanto. (2019). Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(3), 195–205.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1969). *Juvenile delinquency and urban areas*. University of Chicago Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Jambi No.2 Tahun 2014